

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jepang merupakan sebuah negara kepulauan dengan empat pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Melihat kondisi geografis Jepang yang berada berdekatan dengan negara-negara superpower Asia lainnya yaitu China dan Korea, wilayah Jepang relatif rentan dalam hal keamanannya. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Jepang pun tergolong rendah bahkan dapat dikatakan sangat minim, karena kondisi geografisnya yang berupa pegunungan. Hal ini kurang menguntungkan bagi rakyat Jepang yang populasinya sekarang telah mencapai jumlah 127,333,002 juta jiwa.¹ Kondisi seperti itulah yang mempengaruhi perilaku Jepang, terutama dalam arah kebijakan luar negerinya.

Pada pasca Restorasi Meiji Jepang menerapkan *Fukoku Kyohey* yang artinya “Rich country, strong army”. Ketika itu muncul cita-cita agar bangsa Jepang dapat menjadi bangsa yang lebih kaya, lebih maju dalam sektor industri dan membangun angkatan perang yang lebih kuat sebagai pelindungnya. Orientasi para elit Jepang saat itu adalah tidak cukup hanya memiliki militer yang kuat untuk mempertahankan diri agar aman dari serangan negara lain, tapi juga harus melakukan ekspansi wilayah. Cita-cita ini dibuktikan dengan menundukkan Cina dalam Perang Cina – Jepang I (1894 – 1895) dan Perang Cina – Jepang II (1931 – 1945) serta perang melawan Rusia dalam perang Rusia – Jepang (1904 – 1905).

¹ The World Factbook. Available online at <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/>
Last updated version as of 10 October 2004, downloaded on 13 November 2004.

Kemudian pada tahun 1910 Jepang berhasil menganeksasi semenanjung Korea.² Bahkan Jepang juga mulai mendirikan pakta militer dengan Jerman dan Italia. Dan sejak saat itu Jepang mulai diakui oleh dunia Internasional sebagai negara besar yang kuat, meskipun wilayah yang dimiliki oleh Jepang sangat kecil. Ambisi Jepang rupanya tidak hanya terbatas pada keinginannya untuk menjadi pemimpin Asia dengan membangun Asia Timur Raya, tetapi juga untuk selalu mencapai status yang sama dengan bangsa barat.

Kebangkitan fasisme Jepang mulai terlihat se usai Perang Dunia I. Pelaksanaannya yang pertama ialah penyerbuan ke Manchuria pada tahun 1931. Dengan mudah Jepang berhasil menduduki Manchuria dan mendirikan negara boneka di sana (*Manchukuo*). Agresi Jepang atas Manchuria itu menuai celaan dari Volkenbond atau Liga Bangsa-bangsa. Tetapi celaan itu segera dijawab oleh Jepang dengan tindakan yang jelas: Jepang berhenti sebagai anggota Liga Bangsa-bangsa.³

Jepang berubah menjadi sebuah negara yang agresif dan ekspansionis dikarenakan besarnya pengaruh kaum militeris Jepang terhadap pemerintahan negara pada saat itu. Menteri-menteri, bahkan juga perdana menteri Jepang yang suka damai, dibunuh oleh kaum militeris Jepang ini. Mereka ini lebih berkuasa daripada perlemen, dan di bawah selimut hormat terhadap Tenno Heika, sebetulnya pun memerintah kaisarnya sendiri.⁴

² Tahiro, *Sepak Terjang Jepang di Indonesia*, Lembaga Humaniora, Jakarta, 2003, hal. 4 -

Puncak dari tindakan Jepang yang agresif itu adalah penyerangan terhadap pangkalan utama Angkatan Laut AS di Pasifik, Pearl Harbour. Pada tanggal 8 Desember 1941 dibawah komando Jenderal Hideki Tojo, Jepang melakukan serangan mendadak terhadap Pearl Harbour. Serangan bom, torpedo, dan tembakan senapan mesin yang dilepaskan oleh 353 pesawat terbang pembom, pembom tukik, pesawat torpedo, dan pesawat pemburu yang dilepaskan dari keenam kapal induk Jepang itu telah menandai pecahnya Perang Pasifik.⁵ Setelah serangan mendadak yang dilakukan oleh Jepang itu, tercatat 2403 orang Amerika mati atau hilang dan 1178 luka-luka. Puluhan kapal perang dan pesawat terbang di lapangan udara hancur atau rusak.⁶

Serangan mendadak dari Jepang ini rupanya tidak dibiarkan begitu saja oleh pihak Amerika. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika membalas serangan itu dengan menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima. Dan hasilnya, antara 70.000 – 80.000 penduduk Hiroshima mati, dan kota itu lenyap dari permukaan bumi.⁷ Tetapi, bom atom yang telah dijatuhkan di Hiroshima tidak juga membuat Jepang menyerah. Baru setelah bom atom kedua “Fat Man” dijatuhkan di atas kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, yang membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Akibat serangan balik Amerika itu, Jepang mengalami kehancuran dan kerugian yang sangat besar, antara lain korban sebanyak 1.800.000 jiwa, 25 % kekayaan negaranya hancur, 40 % wilayah dan 66 kota besar telah menjadi korban serangan dan 30 % kapasitas industri Jepang hancur.⁸

⁵ *Ibid*, hal. 333

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hal. 336

⁸ Robert E. Wood, *Japan's Political System*, Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1978, hal. 10

Semenjak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Amerika melalui *The American War Navy Coordinating Committee* mulai masuk dalam politik dan pemerintahan Jepang dengan dalih untuk menjinakkan Jepang. Bahkan peranan militer Jepang diluar wilayah Jepang dibatasi oleh konstitusi tahun 1947 pasal 9 yang berbunyi:

“Dalam keinginan yang sesungguhnya akan mencapai perdamaian berdasarkan keadilan dan ketertiban, bangsa Jepang untuk selama-lamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai wahana untuk menyelesaikan perselisihan internasional.”

“Demi mencapai tujuan alinea tersebut di atas, tidak akan dibina angkatan darat, laut dan udara maupun potensial perang lainnya. Hak perang negara tidak akan diakui.”⁹

Berdasarkan konstitusi diatas, Jepang kemudian menyerahkan masalah keamanannya di bawah payung keamanan Amerika atau yang sering disebut “Umbrella Security”.

Sejak pemberlakuan konstitusi tersebut, perilaku politik Jepang mulai berubah drastis. Dari negara yang sangat aktif dan ekspansionis menjadi negara yang sangat pasif dan reaktif. Tetapi secara perlahan-lahan, Jepang juga mulai membangun kembali perekonomian dan harga dirinya sebagai sebuah bangsa, yang ikut hancur bersama dengan kekalahannya dalam perang. Adanya perjanjian keamanan antara Jepang – Amerika dan pembatasan bagi peranan militer Jepang rupanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Jepang. Karena sudah tidak lagi memikirkan tentang masalah keamanannya yang sekarang sudah menjadi tanggungjawab Amerika, Jepang dapat lebih memfokuskan perhatiannya pada

masalah ekonomi, dan hasilnya sampai saat ini Jepang berkembang menjadi raksasa ekonomi dunia, yang secara tidak langsung juga menjadi saingan Amerika Serikat.

Tetapi pada dasawarsa 1970-an, arah kebijakan politik Jepang mulai bergeser. Jepang menjadi negara yang relatif lebih aktif. Perubahan perilaku politik Jepang banyak dipengaruhi oleh konteks Internasional yang terjadi pada saat itu, yaitu¹⁰ :

1. Terjadinya Nixon Shock. Pada tahun 1972-1978 Amerika mengakui China sebagai negara yang berdaulat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jepang. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam pada Jepang.
2. Amerika Serikat yang terlibat dalam perang Vietnam tidak pernah menunjukkan adanya tanda-tanda kemenangan. Sehingga Jepang menganggap Amerika sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk menjadi pelindung kemanannya Jepang.
3. Kemunduran perekonomian Amerika yang menyebabkan Amerika kemudian melepaskan standart emas.

Sejak saat itulah Jepang menjadi lebih aktif mendekati negara-negara Asia Tenggara.

Sementara itu pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967, melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, terbentuklah suatu wadah

¹⁰ Ali Muhammad, *Reading Brick Hubungan Internasional Kawasan (Asia Pasifik)*.

kerjasama yang disebut Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Jika pada awal tahun-tahun berdirinya, masih ada pihak yang mempertanyakan keabsahan ASEAN sebagai suatu organisasi yang benar-benar mewakili Asia Tenggara, dengan bergabungnya Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan terakhir, Kamboja pada tahun 1999, dalam pertumbuhannya sekarang ini ASEAN benar-benar dapat dikatakan sudah mewakili semua negara di kawasan Asia Tenggara.

Pada awal mula pembentukannya, ASEAN hanya berfungsi sebagai wadah untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi. Prestasi terbesar yang diraih oleh ASEAN pada saat itu adalah bahwa ASEAN telah berhasil menjadi basic pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Padahal sebenarnya tujuan pembentukan ASEAN sangat luas, tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang politik dan militer.

Berakhirnya Perang Dingin telah membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan perjalanan ASEAN. Kawasan yang semula stabil karena adanya Amerika Serikat yang bertindak sebagai penjaga keamanan menjadi berubah situasinya. Kemunculan China sebagai hegemoni baru menggantikan Amerika Serikat membuat ASEAN mau tidak mau harus memikirkan kembali masalah keamanan di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Terlebih lagi kawasan Asia adalah kawasan yang rentan konflik. Potensi konflik yang muncul dikawasan ini adalah perebutan status kepemilikan atas kepulauan yang terletak di laut Cina Selatan. Kepulauan yang dipersengketakan itu antara lain Kepulauan Pratas dan

Macclesfield Bank yang diperebutkan oleh Cina dan Taiwan, serta Kepulauan Spratlys yang memiliki lebih dari seribu pulau, diperebutkan oleh enam negara, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei.¹¹

Untuk menanggapi situasi ini ASEAN mulai membentuk sebuah forum untuk membicarakan masalah-masalah keamanan. Akhirnya pada tahun 1990-an terbentuklah ASEAN Regional Forum, yaitu sebuah forum kerjasama di bidang keamanan. Forum Regional ASEAN didirikan berdasarkan keputusan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-26 pada tahun 1993. Saat ini ARF adalah satu-satunya mekanisme dialog tentang keamanan multilateral di Kawasan Asia-Pasifik. Forum keamanan yang beranggotakan 10 negara anggota ASEAN, 10 negara mitra dialog ASEAN (Australia, Canada, China, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Amerika Serikat dan India), serta 3 negara peninjau antara lain Papua Nugini, Mongolia dan Korea Utara mulai mengadakan pertemuan pertamanya di Bangkok tahun 1994.¹² Pada pertemuan ke-11 ARF di Jakarta, 1-2 Juli 2004 lalu. Jumlah peserta ARF bertambah lagi menjadi 24 negara dengan masuknya Pakistan.¹³

Sementara bagi anggota tetap ARF yang merupakan negara-negara ASEAN sendiri yang hanya berjumlah 10 negara, mengundang lebih banyak negara di luar kawasan ASEAN untuk memikirkan masalah keamanan ASEAN tentu akan menimbulkan dampak dan implikasi-implikasi tertentu bagi ASEAN dan kawasan Asia Tenggara, apalagi di antara negara-negara tersebut ada yang

¹¹ *Ibid*, hal. 98 – 99

¹² Jamil M Flores, *ASEAN: How It Works*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2000, hal.17

¹³ Samuel Dasorda, *Setelah Rempis 27 Tahun "One Voice" ASEAN?* Dilatir dari

memiliki kepentingan-kepentingan strategis tertentu terhadap kawasan ini dari dulu.¹⁴

Kesediaan Jepang untuk menjadi salah satu negara mitra dialog bagi ARF dipandang sebagai sebuah gerakan baru bagi peningkatan peran aktif Jepang dalam dunia Internasional. ARF jelas merupakan sebuah forum yang membicarakan tentang keamanan, sedangkan apabila dilihat dari kebijakan dalam hal keamanan, Jepang dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam hal keamanannya Jepang masih berada dibawah payung keamanan Amerika. Dan terbukti, selama beberapa dasawarsa, “payung keamanan” yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan penangkal yang paling efektif terhadap agresi dari luar yang dapat mengganggu kedaulatan Jepang.

Sementara bagi ASEAN, memasukkan tiga kekuatan besar Asia (Cina, Korea Selatan dan Jepang) dalam satu wadah organisasi membawa ARF pada situasi yang tidak mudah. Terlebih lagi jika ketiga kekuatan itu memiliki kepentingan yang berbeda terhadap wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi peran ASEAN Regional Forum sebagai satu-satunya forum keamanan di Asia dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Asia sendiri.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulis dalam menulis skripsi dengan judul “Kepentingan Jepang

1. Memberikan penjelasan (eksplanasi) bagaimana keterlibatan dan peran serta Jepang dalam ASEAN Regional Forum.
2. Menganalisa sejauh mana kepentingan Jepang dalam Forum Regional ASEAN, dan hubungannya dengan arah kebijakan politik Luar Negeri Jepang saat ini, terutama dalam hal keamanannya.

C. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang muncul adalah Mengapa Jepang bersedia menjadi mitra dialog dalam ASEAN Regional Forum (ARF)?

D. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk dapat menganalisa fenomena sejauh mana kepentingan sebuah negara dalam suatu forum kerjasama keamanan, kita dapat menggunakan konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Kedaulatan Nasional

1. Konsep Kepentingan Nasional

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹⁵

Berdasarkan konsep Kepentingan Nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin

¹⁵ Jack C. Plano & Roy Olton, *International Relations Dictionary*, Rinohard and Winstone, Inc, USA, 1969, hal. 128

politik terhadap masalah-masalah domestik maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara mereka terhadap masyarakat Internasional.

Kepentingan nasional suatu negara-bangsa timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga negara-bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar batas-batas negaranya.¹⁶

Kepentingan nasional Jepang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga keutuhan wilayah harus ditopang oleh kekuatan militer. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Jepang membuat Jepang menjadi tergantung pada dunia Internasional. Di sisi lain dalam era persaingan global, kebutuhan akan perluasan pasar menjadi faktor utama dalam perdagangan bebas, sehingga persaingan dan perluasan pasar ekspor seringkali menjadi hal yang sangat sensitif dalam suatu hubungan antar bangsa.

Kebutuhan keamanan Jepang pada masa kini sangat berbeda dengan di masa lampau. Sekarang ini Jepang telah menjadi raksasa ekonomi kedua setelah Amerika Serikat. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai Jepang mau tidak mau harus dibarengi dengan meningkatnya peran Jepang di dunia Internasional, baik secara politik, ekonomi maupun keamanan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional Jepang, dimana tercapainya kestabilan dan keamanan kawasan dan dunia Internasional akan sangat mendukung kelancaran dan kepentingan Jepang.

¹⁶ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal. 29

Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami penderitaan akibat penerapan militerisme yang keliru, Jepang menyadari bahwa kebijaksanaan keamanan yang semata-mata memperhatikan aspek militer akan gagal memberikan sumbangan yang berguna bagi perdamaian dunia. Jepang juga menyadari bahwa perdamaian dan kemakmuran internasional merupakan prasyarat bagi perdamaian dan kemakmuran Jepang sendiri. Bagi Jepang, sebagai sebuah negara yang harus berpegang teguh pada sikap pertahanan yang terbatas semata-mata untuk pertahanannya sendiri, peran diplomasi aktif dalam kebijaksanaan keamanan memiliki arti yang sangat penting. Tidak ada kebijaksanaan keamanan yang dapat dengan cukup memenuhi kebutuhan suatu negara, besar atau kecil, tanpa suatu unsur diplomasi untuk meningkatkan lingkungan keamanannya sendiri¹⁷

2. Konsep Kedaulatan Nasional

Karakteristik utama negara – bangsa adalah kedaulatan. Dalam literatur hubungan internasional kedaulatan diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan negara tertinggi yang tunduk pada batasan-batasan eksternal.¹⁸ Seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, yang dianggap sebagai bapak hukum internasional, mendefinisikan kedaulatan sebagai : Suatu kekuatan yang tindakan-tindakannya tidak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain. Kedaulatan

¹⁷ *Jepang Dewasa Ini, Op.cit*, hal. 33

¹⁸ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional : Konsep dan Prinsip*, Jilid kedua, Mardas Mahus, Praetice Hall Inc, New Jersey, 1986, hal.

dimanifestasikan apabila sebuah negara terbebas dari pengontrolan negara-negara lain.¹⁹

Jadi dengan kata lain, kedaulatan adalah kemampuan sebuah negara – melalui pemerintahnya – untuk menjadi penguasa di negaranya, untuk mengontrol kehidupan domestik, dan dalam hubungan-hubungan luar negerinya mempunyai opsi untuk memasuki dan meninggalkan aliansi, untuk berperang atau tetap bersikap netral, dan untuk mempertahankan kepentingan secara maksimum.²⁰

Jepang sebagai sebuah negara yang merdeka seharusnya juga memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan itu mencakup kedaulatan internal maupun kedaulatan eksternal. Tetapi semenjak Jepang terikat dalam perjanjian keamanan dengan Amerika, kedaulatan penuh itu tampaknya hanyalah sebuah kedaulatan semu. Jepang tidak benar-benar memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan sikapnya terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan konteks internasional.

Dalam hal politik dan diplomasi, dapat dikatakan bahwa Jepang adalah negara yang tidak benar-benar memiliki pendirian politik dan diplomasi yang independen. Kebijakan-kebijakan Jepang terhadap masalah-masalah internasional selama ini sangat banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat.²¹ Bahkan dikatakan, dengan sinisme, bahwa Jepang merupakan ‘seorang raksasa ekonomi tetapi seorang kerdil dalam bidang politik’. Secara umum, dalam arena internasional, sebuah negeri yang secara ekonomi kuat juga memiliki pengaruh politik dan

¹⁹ *Ibid*, hal. 78

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal. 79

diplomasi yang kuat.²² Tetapi rupanya hal itu tidak berlaku pada Jepang. Selama Jepang masih sangat bergantung pada Amerika, maka selama itu pulalah Jepang menjadi sebuah negara yang 'kerdil' secara politik.

Sebagai sebuah negara yang merdeka, Jepang juga berkeinginan untuk menjadi sebuah negara yang "normal", yang memiliki kedaulatan penuh tanpa adanya pengontrolan dari Amerika. Dan satu-satunya cara agar Jepang dapat memiliki kedaulatan penuh adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap Amerika. Dengan begitu Jepang akan dapat meningkatkan peran aktifnya di dunia internasional, dan sekaligus memperkuat peran politik dan diplomasinya. Dengan perekonomian yang kuat dan didukung oleh kekuatan politik dan diplomasi yang handal dan independen, Jepang dapat muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi utama untuk berperan aktif dalam upaya membangun perdamaian dunia.²³

E. HIPOTESA

Jepang bersedia menjadi mitra dialog bagi ASEAN Regional Forum karena adanya keinginan Jepang untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika dalam hal keamanan dan untuk mencari mitra kerjasama yang lebih

F. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

Untuk penulisan skripsi mengenai kepentingan Jepang dalam Forum Regional ASEAN, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Data yang diperoleh dan diolah dari buku, majalah, jurnal, kliping, koran dan artikel atau tulisan yang diakses dari internet, serta sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab, sebagai berikut :

Bab I, di dalam bab ini terdapat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan dan analisa data, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini akan dibahas tentang sejarah dan latar belakang berdirinya ASEAN Regional Forum, tujuan berdirinya ASEAN Regional Forum itu sendiri, negara anggota ASEAN Regional Forum, Perkembangan ASEAN Regional Forum dewasa ini serta tantangan dalam ASEAN Regional Forum.

Bab III, pada bab ini akan membahas tentang hubungan Jepang - Amerika, pembentukan perjanjian keamanan antara Jepang – Amerika, bagaimana perkembangan hubungan Jepang – Amerika pasca Perang Dunia II, kelangsungan perjanjian keamanan, dan peningkatan peran aktif Jepang di dunia Internasional.

Bab IV, bab ini akan membahas tentang proses keterlibatan Jepang dalam ASEAN Regional Forum sejak tahun 1990. Jepang – ASEAN baik dalam bidang

ekonomi maupun dalam bidang keamanan, serta keuntungan Jepang dalam ASEAN Regional Forum.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan, yang akan menggambarkan korelasi antara hipotesis dengan hasil penelitian